



## **CATATAN LHKPN BPPMHKP SEMARANG**

Sehubungan dengan pelantikan Kepala BPPMHKP Semarang yaitu Ibu Heny Irawati, S.Pi, M.P menggantikan ibu Dr. Titis Candra Dewi, S.Pi.,M.Sc pada tanggal 12 Juni 2026.

Bersama ini kami sampaikan bahwa LHKPN Kepala BPPMHKP Semarang dalam proses pelaporan sehingga belum dapat disampaikan, dan sebagai penyampaian informasi kami sampaikan Pengumuman LHKPN Plt.Kepala UPT Sebelumnya atas nama ibu Dr. Titis Candra Dewi, S.Pi.,M.Sc dan akan kami sampaikan setelah proses pelaporan selesai.





**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF

**LEMBAGA** : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

**UNIT KERJA** : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : TITIS CANDRA DEWI
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 1001395

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 234 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 15.000.000

1. MOTOR, BEAT H1B02N42LO A/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ----

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 20.000.000

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 1.535.000.000

**III. HUTANG** Rp. 350.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.185.000.000

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA :  
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN  
PERIKANAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : UTAMI DEWI APRILYANI
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 84766

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 650.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/36 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 104.800.000

1. MOTOR, YAMAHA FINO SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.300.000
2. MOTOR, KAWAZAKI KLX Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 13.500.000
3. MOBIL, HONDA HONDA BRIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 87.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 26.800.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 51.583.516

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 833.183.516

**III. HUTANG** Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 833.183.516

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpnp.kpk.go.id](http://elhkpnp.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpnp.kpk.go.id](http://elhkpnp.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik



Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
**UNIT KERJA** : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : HENING ANINDIASWASTI  
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN  
3. NHK : 412273

**II. DATA HARTA**

|                                                                         |     |             |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| <b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>                                            | Rp. | 500.000.000 |
| 1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/45 m2, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000 |     |             |
| <b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>                                   | Rp. | ----        |
| <b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>                                        | Rp. | 10.000.000  |
| <b>D. SURAT BERHARGA</b>                                                | Rp. | ----        |
| <b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>                                            | Rp. | 21.021.827  |
| <b>F. HARTA LAINNYA</b>                                                 | Rp. | 35.305.826  |
| Sub Total                                                               | Rp. | 566.327.653 |
| <b>III. HUTANG</b>                                                      | Rp. | 156.000.000 |
| <b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>                                | Rp. | 410.327.653 |

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
**UNIT KERJA** : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : YANI SUKPARWANTI  
2. Jabatan : BENDAHARA PENERIMAAN  
3. NHK : 644242

**II. DATA HARTA**

|                                                                                    |     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| <b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>                                                       | Rp. | ----       |
| <b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>                                              | Rp. | 18.580.000 |
| 1. MOTOR, HONDA BEAT HONDA BEAT DELUXE Tahun 2022,<br>HASIL SENDIRI Rp. 18.580.000 |     |            |
| <b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>                                                   | Rp. | 27.400.000 |
| <b>D. SURAT BERHARGA</b>                                                           | Rp. | ----       |
| <b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>                                                       | Rp. | 650.000    |
| <b>F. HARTA LAINNYA</b>                                                            | Rp. | ----       |
| <b>Sub Total</b>                                                                   | Rp. | 46.630.000 |
| <b>III. HUTANG</b>                                                                 | Rp. | 45.465.000 |
| <b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>                                           | Rp. | 1.165.000  |

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG : EKSEKUTIF**

**LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**UNIT KERJA : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : YUDHI YULIANTORO
2. Jabatan : PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
3. NHK : 641002

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 550.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/38 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 9.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ---

**D. SURAT BERHARGA** Rp. 208.063.045

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 7.282.200

**F. HARTA LAINNYA** Rp. 72.000.000

**Sub Total** Rp. 846.345.245

**III. HUTANG** Rp. 401.745.459

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 444.599.786

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.